

Informasi bulanan

Juli 2024

solvetax

solutions for your tax

**Konsultasi pajak SolveTax
StB Dipl.-Bw.(FH) Sascha Schneider
Konsultan spesialis untuk hukum pajak internasional**

Schwindstrasse 2
63739 Aschaffenburg

Telepon: +49 151 28960404

E-mail: mail@solvetax.de

Selamat datang kembali di dunia pajak dan keuangan dalam informasi bulanan,

Pengadilan Fiskal Federal harus berurusan dengan implikasi pajak dari perjanjian yang dibuat untuk memberikan komitmen pensiun kepada direktur pelaksana PT dan, dengan keputusannya, memperjelas substansi dari dua bidang utama dalam bidang hukum ini.

Distribusi keuntungan tersembunyi terus menyibukkan pengadilan pajak. pengadilan pajak Düsseldorf baru-baru ini memutuskan bahwa jika pemegang saham tidak langsung dari PT memberikan hak penolakan pertama untuk properti yang berlokasi di luar negeri dengan imbalan pembayaran, yang mana GmbH tidak memiliki kepentingan operasional, maka pembayaran tersebut merupakan distribusi keuntungan tersembunyi.

Pertanyaan berulang kali muncul mengenai keuntungan dan kerugian dari sistem fotovoltaik yang harus ditangani oleh pengadilan pajak. Pengadilan Fiskal Baden-Württemberg baru-baru ini harus memutuskan pengakuan pajak atas kerugian dari pengoperasian sistem fotovoltaik di rumah sendiri.

Undang-Undang Pajak Tahunan 2024 telah lama dinantikan. Rancangan undang-undang tersebut telah disahkan, berisi banyak perubahan hukum di seluruh undang-undang perpajakan.

Apakah Anda memiliki pertanyaan mengenai artikel dalam edisi Informasi Bulanan kali ini atau topik lainnya? Jangan ragu untuk menghubungi kami.

Kami akan dengan senang hati membantu Anda.

Pembayaran Pajak Penghasilan

Implikasi pajak dari perjanjian pemberian komitmen pensiun kepada direktur pelaksana PT

Pengadilan Fiskal Federal harus berurusan dengan implikasi pajak dari perjanjian yang dibuat untuk memberikan komitmen pensiun kepada direktur pelaksana PT. Keputusan ini memperjelas substansi dari dua bidang utama dalam bidang hukum ini. Pertama, Pengadilan Fiskal Federal menetapkan bahwa istilah "komitmen pensiun" atau "kewajiban pensiun" terkait dengan beberapa pembayaran berbeda yang dilakukan oleh perusahaan kepada orang yang berhak atas pensiun. Oleh karena itu, konsekuensi hukum dari penolakan untuk membuat ketentuan tidak terjadi berdasarkan prinsip "semua atau tidak sama sekali", seperti yang tersirat dalam istilah "jika" dalam undang-undang, tetapi ada juga pengakuan parsial atas manfaat yang dijanjikan, seperti yang dapat diturunkan dari istilah "sejauh" dalam teks hukum. Manfaat parsial termasuk pembayaran pensiun saat ini dalam jumlah yang dijanjikan, kemungkinan pensiun cacat dan juga pensiun janda/duda sesuai dengan persyaratan hukum.

Oleh karena itu, masing-masing manfaat individu harus terlebih dahulu diperiksa kesesuaiannya dengan persyaratan dan jika perlu, ketentuan untuk manfaat pensiun individu harus ditolak, tetapi diperbolehkan untuk manfaat parsial lainnya. Jika, misalnya, tidak ada peraturan yang jelas tentang pengurangan kapasitas penghasilan untuk pensiun cacat, tidak ada ketentuan yang dapat dibuat untuk hal ini, tetapi kewajiban dari pensiun tetap ada. Namun, jika elemen individu dari "manfaat prospektif" tidak dapat ditentukan dengan jelas dan tegas, manfaat yang tersisa mungkin masih memenuhi syarat untuk disediakan. Sebagai contoh, dalam kasus yang dipermasalahkan, Pengadilan Fiskal Federal menganggap peraturan tentang awal pensiun yang lebih awal sebelum dimulainya pensiun yang secara umum disepakati pada usia 65 tahun tidak jelas. Oleh karena itu, perhitungan provisi hanya dapat didasarkan pada pencapaian usia tersebut dan pembayaran pensiun untuk periode yang lebih awal bukan merupakan biaya bisnis tetapi merupakan distribusi keuntungan tersembunyi. Akibatnya, perhitungan ulang harus dilakukan untuk provisi tahun-tahun sebelumnya dan kasus ini diajukan ke pengadilan pajak.

Distribusi keuntungan tersembunyi sehubungan dengan pemberian hak memesan efek terlebih dahulu atas suatu properti

Penggugat adalah pemegang saham tunggal dari PT J yang pada gilirannya adalah pemegang saham tunggal dari PT Q. Penggugat juga merupakan pemilik sebuah properti di Spanyol. Pada tahun 2013, ia memberikan PT Q hak memesan efek terlebih dahulu atas properti di Spanyol tersebut, yang sebagai gantinya berjanji untuk menanggung kewajiban penggugat. Kemudian, PT Q menggunakan hak penolakan pertama dan menyewakan properti tersebut kepada penggugat. Kantor pajak menganggap hal ini sebagai pengalihan penggunaan istimewa, yang dikualifikasikan sebagai distribusi keuntungan tersembunyi.

Jika sebagai imbalan atas pemberian hak memesan efek terlebih dahulu atas properti yang dimiliki oleh pemegang saham tunggal tidak langsung dari PT, biaya tanah pribadi ditanggung oleh pemegang saham, distribusi keuntungan tersembunyi dalam jumlah kewajiban yang ditanggung harus ditambahkan kepada pemegang saham sesuai dengan keputusan Pengadilan Pajak Düsseldorf jika PT tidak memiliki kepentingan operasional dalam penggunaan properti ini dan tidak ada keuntungan lain yang muncul darinya dari hak memesan efek terlebih dahulu.

Masalah pajak yang berkaitan dengan penyediaan sepeda dan sepeda elektronik dengan aksesorisnya kepada karyawan

Untuk periode dari 01.01.2019 hingga 31.12.2030, tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja untuk penyediaan sepeda perusahaan (listrik) kepada karyawan selain gaji yang telah dibayarkan akan bebas pajak. Pembebasan pajak ini menghasilkan pembebasan kontribusi jaminan sosial. Sepeda listrik, yang secara teknis merupakan kendaraan bermotor (karena motor listriknya juga mendukung kecepatan di atas 25 km/jam), tidak dapat diberikan bebas pajak. Pembebasan pajak hanya berlaku untuk tunjangan yang diberikan sebagai tambahan dari upah yang sudah terutang. Namun dalam praktiknya, sebagian besar yang disebut sepeda motor kantor diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari model konversi gaji/leasing. Dengan model leasing biasa, pemberi kerja biasanya menyewakan sepeda perusahaan dan menyerahkannya kepada karyawan sebagai bagian dari perjanjian penggunaan yang menggunakan konversi gaji. Dalam hal ini, ada tunjangan non-tunai kena pajak bulanan sebesar **1% dari harga**

eceran yang direkomendasikan (harga eceran kotor) dari sepeda perusahaan yang disediakan, **dibulatkan ke bawah ke 100 euro terdekat.**



Sebagai bagian dari model leasing, sering kali dimungkinkan untuk menyewakan **aksesori sepeda yang khas**, dan otoritas pajak telah menerima banyak permohonan tentang masalah ini. Untuk memastikan interpretasi yang seragam terhadap hukum, otoritas pajak telah mengomentari perlakuan pajak untuk aksesoris sepeda. Menurut hal ini, aksesoris sepeda yang umum mencakup semua perlengkapan yang bergantung. Otoritas pajak hanya mengklasifikasikan aksesoris yang secara permanen melekat pada rangka sepeda atau bagian sepeda lainnya, seperti penyangga sepeda, rak bagasi, spatbor, lonceng, kaca spion, kunci, perangkat navigasi,

pembawa lain yang terpasang atau braket khusus model, sebagai aksesoris yang dilindungi pajak.

Otoritas pajak juga memberikan contoh aksesoris yang tidak dikecualikan dari pajak untuk sepeda. Ini termasuk perlengkapan pengendara (misalnya helm, sarung tangan, pakaian, dll.), perangkat yang dapat dimasukkan ke dalam dudukan khusus model (misalnya ponsel cerdas, perangkat navigasi seluler) atau barang lain (misalnya trailer sepeda, stang, rangka atau tas pelana atau keranjang sepeda). Aksesoris sepeda ini, yang tidak dikecualikan dari pajak, harus dinilai secara terpisah oleh pemberi kerja dan secara teratur merupakan upah kena pajak bagi karyawan.

Donasi untuk bantuan banjir dapat dikurangkan dari pajak .

Di beberapa bagian Jerman selatan, banyak orang mengalami kerusakan akibat badai besar dan banjir yang menyusul. Organisasi bantuan siap sedia di tempat di mana pun dibutuhkan. Siapa pun yang ingin membantu mereka dengan donasi dapat memperoleh manfaat dari keringanan pajak.

Untuk donasi ke organisasi amal hingga 300 euro, kantor pajak hanya membutuhkan bukti sederhana - misalnya, laporan bank atau tangkapan layar transfer. Bukti tersebut harus mencantumkan nama dan nomor rekening donatur dan penerima. Siapa pun yang ingin menyumbangkan lebih dari 300 euro biasanya membutuhkan tanda terima sumbangan yang dikeluarkan oleh organisasi penerima sebagai bukti. Jika terjadi bencana, otoritas pajak dapat melonggarkan aturan ini dan menerima tanda terima sederhana bahkan untuk sumbangan yang lebih besar. Syaratnya, uang tersebut dibayarkan ke rekening khusus yang dibuat khusus untuk bencana yang dimaksud. Hanya sumbangan hingga 20 persen dari penghasilan tahunan Anda yang dapat dikurangkan dari pajak.

Tanda terima tidak harus dikirim secara langsung. Namun, tanda terima tersebut harus diserahkan jika kantor pajak memintanya.

Catatan

Organisasi yang memiliki reputasi baik dapat dikenali, misalnya, melalui stempel sumbangan dari Institut Pusat Jerman untuk Masalah Sosial (DZI).

Kantor pajak di **Baden-Württemberg** ingin memanfaatkan semua langkah perpajakan yang tersedia untuk mengakomodasi warga dan perusahaan yang terkena dampak banjir. Langkah-langkah keringanan khusus termasuk, misalnya, pembayaran pajak di muka yang disesuaikan atau penangguhan jumlah pajak penghasilan, pajak perusahaan atau PPN yang harus dibayar. Dalam kasus-kasus yang dibenarkan, juga dimungkinkan untuk menunda pelaksanaan tanpa harus membayar denda keterlambatan pembayaran. Semua pihak yang terkena dampak dapat menghubungi kantor pajak terkait secara langsung.

Catatan

Bantuan darurat juga ditawarkan di negara-negara bagian lain yang terkena dampak banjir, seperti Bavaria dan Rhineland-Palatinate.

Distribusi hak partisipasi laba sebagai pendapatan dari pekerjaan atau pendapatan dari aset modal

Hak partisipasi laba memberikan kreditur bagian dalam laba perusahaan, di mana kreditur tidak memiliki hak kepemilikan. Menurut pendapat Pengadilan Pajak Hessian, distribusi dari hak partisipasi laba di perusahaan yang ditawarkan hanya kepada para eksekutif merupakan upah jika bunga yang mungkin atas modal partisipasi laba melebihi pengembalian pasar normal.

Dalam hal ini, distribusi tidak memenuhi syarat sebagai pendapatan dari aset modal karena karyawan memperoleh hak partisipasi laba dari asetnya sendiri, menanggung risiko kerugian secara efektif dan berhak atas distribusi untuk seluruh tahun keuangan bahkan jika terjadi cuti sakit atau cuti melahirkan.

Niat untuk mendapatkan keuntungan saat mengoperasikan sistem fotovoltaik (Panel Surya) di rumah anda sendiri

Penilaian apakah sistem panel surya dioperasikan untuk menghasilkan keuntungan harus didasarkan pada periode perkiraan 20 tahun. Jika jumlah listrik yang dihasilkan tidak diverifikasi oleh operator sistem kecil, maka dapat diperkirakan untuk alasan penyederhanaan, dengan mempertimbangkan jumlah rata-rata jam beban penuh 1.000 kWh/kWp. Mengenai listrik yang dikonsumsi sendiri, hal ini mengakibatkan penarikan untuk diakui sebagai pendapatan operasional pada nilai parsial. Nilai parsial dari listrik yang dikonsumsi sendiri sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembangkitannya (biaya akuisisi sistem fotovoltaik dan biaya operasi, yang tersebar di seluruh produksi listrik yang diharapkan dalam 20 tahun) dan tidak dapat digunakan dalam perkiraan laba total dengan tarif tetap EUR 0,20 / kWh yang diterima oleh otoritas pajak dalam kasus-kasus tertentu untuk alasan penyederhanaan. Tidak ada nilai sisa dari sistem fotovoltaik setelah akhir masa manfaat 20 tahun yang diperhitungkan sebagai pendapatan dalam perkiraan laba total.

Ketika mengoperasikan sistem fotovoltaik, bukti prima facie pada awalnya menunjukkan bahwa sistem ini dioperasikan untuk menghasilkan keuntungan. Namun, bukti prima facie (beban pembuktian) ini sudah terguncang oleh fakta bahwa, menurut perkiraan keuntungan total, tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh dalam waktu 20 tahun. Jika

wajib pajak telah menerima kerugian dari sistem fotovoltaik mengingat fakta bahwa listrik yang dihasilkan sendiri secara finansial jauh lebih murah daripada listrik yang dibeli dari penyedia listrik, maka harus diasumsikan bahwa ada alasan pribadi untuk mengoperasikan sistem fotovoltaik yang berada di luar lingkup pendapatan yang relevan menurut undang-undang perpajakan dan bertentangan dengan niat untuk menghasilkan pendapatan. Dalam kasus yang disengketakan di pengadilan pajak Baden-Württemberg, otoritas pajak dengan tepat tidak mengakui kerugian yang diklaim dari operasi komersial karena kurangnya niat penggugat untuk menghasilkan pendapatan.

Keuntungan dari penjualan saham yang sebelumnya diperoleh sebagai bagian dari program partisipasi manajemen sebagai upah

Surplus dari penjualan saham yang sebelumnya diperoleh sebagai bagian dari program partisipasi manajemen dapat, dengan mempertimbangkan semua keadaan dari kasus individu, disebabkan oleh hubungan kerja - dan bukan oleh hubungan hukum khusus yang terpisah dan independen - dan dengan demikian merupakan keuntungan dari pemberi kerja.

Menurut Pengadilan Fiskal Cologne, hal ini terjadi jika saham tersebut diperoleh dengan diskon dan keadaan khusus dari hubungan kerja mempengaruhi nilai jual dan kinerja saham. Dalam kasus sengketa ini, hal ini ditegaskan: ada hak atas distribusi dalam bentuk pembelian kembali setelah saham menjadi hak dan jumlah nilai jual kembali saham tergantung pada kelanjutan hubungan kerja.

Pembayaran PPN

Pergeseran kewajiban pajak - persyaratan untuk orang yang menerima layanan

Pengadilan Fiskal Federal harus memutuskan apakah pembebanan balik kepada penerima jasa mensyaratkan bahwa penerima jasa telah memiliki nomor identifikasi PPN yang valid dan telah menyampaikan hal ini kepada pemasok atau apakah bukti status kewirausahaan penerima jasa juga dapat diberikan melalui cara lain selain nomor identifikasi PPN penerima jasa.

Pertanyaannya di sini adalah persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh seorang pengusaha yang berbasis di komunitas lain yang menyediakan layanan lain kepada pengusaha dan non-pengusaha di Jerman untuk dapat mengasumsikan bahwa penerima layanan kewirausahaannya bertanggung jawab atas PPN.

Penggunaan nomor identifikasi PPN yang valid oleh penerima tidak relevan untuk pengalihan kewajiban pajak. Pengalihan kewajiban pajak dari pemasok ke penerima menguntungkan pemasok dan menyebabkan beban penilaian pada pemasok. Keputusan berdasarkan beban penilaian hanya dapat dibuat dalam proses pengadilan fiskal jika fakta-fakta kasus tidak dapat diklarifikasi.

Hukum Ketenagakerjaan

Tanda terima pemberitahuan pengakhiran: Surat tercatat hanya dengan bukti pengiriman

Menurut Pengadilan Tinggi Ketenagakerjaan Baden-Württemberg, bukti penerimaan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja di pengadilan memerlukan bukti pengiriman dari kantor pos. Bukti pengiriman dan status pengiriman saja tidak cukup.

Lain-lain

Penerbangan drone di atas properti residensial untuk mengumpulkan iuran adalah tindakan yang melanggar hukum

Pengadilan Administratif Bavaria memutuskan bahwa penerbangan drone yang direncanakan di sebuah properti hunian untuk menentukan luas lantai adalah melanggar hukum.

Kota Neumarkt-Sankt Veit pada awalnya merencanakan survei drone terhadap berbagai properti hunian pada bulan Oktober 2023 untuk menentukan luas lantai bangunan yang ada di sana. Data yang diperoleh dengan cara ini akan digunakan untuk menghitung apa yang disebut biaya produksi, yang dikenakan untuk koneksi properti ke sistem pembuangan air limbah kota. Setelah pemohon, yang memiliki properti hunian di

wilayah kota, diberitahu tentang rencana penerbangan drone, ia mengajukan permohonan ke pengadilan administratif Munich, yang mengabulkan permohonannya yang mendesak. Pemerintah kota mengajukan banding atas keputusan ini ke Pengadilan Administratif Bavaria.

Perundang-undangan

Dewan Uni Eropa mengadopsi undang-undang tentang kecerdasan buatan (AI)

Pada tanggal 21 Mei 2024, Dewan Uni Eropa mengadopsi apa yang disebut Undang-Undang Kecerdasan Buatan. Undang-undang ini mengikuti pendekatan "berbasis risiko", yang berarti bahwa semakin tinggi risiko bahaya bagi masyarakat, semakin ketat aturannya.

Undang-undang baru ini bertujuan untuk mempromosikan pengembangan dan pengenalan sistem AI yang aman dan dapat dipercaya di seluruh pasar tunggal Uni Eropa baik oleh aktor swasta maupun publik. Pada saat yang sama, undang-undang ini juga bertujuan untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara Uni Eropa dan mendorong investasi dan inovasi di bidang kecerdasan buatan di Eropa. Undang-Undang AI hanya berlaku untuk area hukum UE dan memberikan pengecualian, misalnya, untuk sistem yang digunakan secara eksklusif untuk tujuan militer dan pertahanan dan untuk tujuan penelitian.

Aturan tentang identitas digital Eropa berlaku: dompet digital akan hadir pada tahun 2026

Peraturan tentang pengenalan identitas digital Eropa mulai berlaku pada 20.05.2024. Peraturan ini dimaksudkan untuk membuka jalan bagi semua warga negara Uni Eropa agar dapat menggunakan dompet digital Eropa mulai tahun 2026. Ini akan terdiri dari aplikasi seluler yang akan dikeluarkan di setiap negara anggota. Ini akan memungkinkan warga negara dan penduduk Uni Eropa untuk mengidentifikasi diri mereka secara online dengan keamanan penuh dan mengakses layanan online publik dan pribadi di seluruh Eropa.

Undang-Undang Pajak Tahunan 2024 disahkan oleh Kabinet Federal

Pada tanggal 5 Juni 2024, Kabinet Federal mengadopsi rancangan Undang-Undang Pajak Tahunan (JStG 2024). Undang-undang ini mengatur langkah-langkah yang signifikan, misalnya untuk mendorong pengurangan birokrasi atau mempercepat digitalisasi dan mengubah sejumlah besar undang-undang di seluruh undang-undang perpajakan dengan sekitar 130 langkah individual. Karena prosedur legislatif baru-baru ini menunjukkan bahwa penundaan sering terjadi, maka belum mungkin untuk membuat **pernyataan definitif tentang jadwal lebih lanjut.**

Pajak properti: rekomendasi tingkat penilaian yang dihitung untuk provinsi Hesse

Pajak properti yang baru akan berlaku mulai tahun 2025. Salah satu tujuannya adalah untuk mencapai netralitas pendapatan bagi pemerintah daerah. Rekomendasi dari negara bagian Hesse mengenai tingkat penilaian kini telah disampaikan. Pemerintah kota harus mengumpulkan jumlah pajak properti yang kurang lebih sama di tahun 2025 di bawah undang-undang yang baru dengan yang dikumpulkan di tahun 2024 di bawah undang-undang yang lama. Faktor utama di sini adalah tingkat penilaian. Negara bagian telah membuat rekomendasi mengenai tingkat penilaian yang dapat digunakan untuk mencapai netralitas pendapatan. Rekomendasi negara bagian tidak mengikat pemerintah kota. Menurut rekomendasi yang dihitung secara matematis, 344 kota dapat mengurangi tingkat penilaian mereka untuk pajak properti, 72 kota dapat meningkatkannya dan 5 kota dapat mengadopsi tingkat sebelumnya lagi untuk memastikan netralitas pendapatan.

Pengumuman penilaian pajak pada hari Sabtu dihindari

Undang-Undang Modernisasi Hukum Pos yang disahkan oleh Bundestag pada tanggal 13.06.2024 memodernisasi hukum pos dan, di antaranya, memperpanjang persyaratan waktu pengiriman untuk pengiriman surat oleh penyedia layanan pos. Untuk menyesuaikan aturan praduga untuk pemberitahuan tindakan administratif dengan persyaratan waktu pengiriman yang diperpanjang, tiga hari yang sebelumnya disediakan akan diubah menjadi empat hari. Ini berarti bahwa ketetapan pajak dan tindakan

administratif lainnya dianggap telah diumumkan pada hari keempat setelah diumumkan, dan bukan tiga hari sebelumnya; dalam hal pengambilan data ketetapan secara elektronik, empat hari setelah data tersebut tersedia.

Persyaratan tenggat waktu yang diperpanjang juga menyebabkan penyesuaian dalam **perhitungan tenggat waktu**. Dalam pernyataannya, Deutscher Steuerberaterverband e.V. (DStV - Asosiasi Konsultan Pajak Jerman) mengimbau legislator untuk memastikan bahwa tenggat waktu tidak berakhir di akhir pekan. Hasilnya, Komite Urusan Ekonomi Bundestag melakukan perbaikan dan **mencegah penilaian pajak diumumkan pada hari Sabtu**. Undang-undang tersebut sekarang harus melewati Dewan Federal.

Jejak

© 2024 Konten telah disiapkan dengan sangat hati-hati, tidak mengklaim sebagai lengkap dan bukan merupakan pengganti pemeriksaan dan saran dalam kasus-kasus individual.

Tanggal pajak/jaminan sosial

Juli/Agustus 2024

| Jenis pajak | | Kedewasaan | |
|---|----------------------------|--|-------------------------|
| Pajak penghasilan, pajak gereja, biaya tambahan solidaritas | | 10.07.2024 ¹ | 12.08.2024 ² |
| Pajak pertambahan nilai | | 10.07.2024 ³ | 12.08.2024 ⁴ |
| Berakhirnya masa tenggang untuk jenis pajak di atas jika pembayaran dilakukan oleh: | Transfer bank ⁵ | 15.07.2024 | 15.08.2024 ⁸ |
| | Periksa ⁶ | 10.07.2024 | 12.08.2024 |
| Pajak perdagangan | | tidak berlaku | 15.08.2024 ⁸ |
| Pajak properti | | Tidak berlaku | 15.08.2024 ⁸ |
| Berakhirnya masa tenggang untuk jenis pajak di atas jika pembayaran dilakukan oleh: | Transfer bank ⁵ | Tidak berlaku | 19.08.2024 |
| | Periksa ⁶ | Tidak berlaku | 15.08.2024 |
| Asuransi sosial ⁷ | | 29.07.2024 | 28.08.2024 |
| Pajak keuntungan modal, biaya tambahan solidaritas | | Pajak capital gain dan biaya tambahan solidaritas yang harus dibayarkan harus dibayarkan ke kantor pajak terkait pada saat yang sama dengan distribusi laba kepada pemegang saham. | |

- 1 Untuk bulan terakhir, untuk pembayar triwulanan selama triwulan kalender terakhir.
- 2 Selama sebulan terakhir.
- 3 Untuk bulan terakhir, untuk bulan sebelumnya dalam hal perpanjangan permanen, dan untuk kuartal kalender terakhir dalam hal pembayar triwulanan tanpa perpanjangan permanen.
- 4 Untuk bulan terakhir, untuk bulan kedua dari belakang dalam hal perpanjangan permanen, dan untuk kuartal kalender terakhir dalam hal pembayar triwulanan dengan perpanjangan permanen.
- 5 SPT PPN dan SPT PPh masa depan umumnya harus diserahkan (secara elektronik) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode pelaporan. Jika tanggal 10 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka hari kerja berikutnya adalah tenggat waktunya. Tidak ada biaya keterlambatan pembayaran jika pembayaran terlambat hingga tiga hari. Transfer bank harus dilakukan tepat waktu sehingga tanggal pada rekening kantor pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
- 6 Ketika membayar dengan cek, harap diperhatikan bahwa pembayaran tidak dianggap telah dilakukan hingga tiga hari setelah cek diterima oleh kantor pajak. Otorisasi pendebitan langsung harus diterbitkan sebagai gantinya.
- 7 Iuran jaminan sosial jatuh tempo pada hari kerja bank ketiga terakhir pada bulan berjalan. Prosedur debit langsung disarankan untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran. Semua dana asuransi kesehatan memiliki tenggat waktu standar untuk mengirimkan laporan kontribusi. Laporan tersebut harus diterima oleh agen penagihan masing-masing selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo (yaitu pada tanggal 25.07.2024/26.08.2024, pukul 00.00 dalam setiap kasus). Keunikan regional mengenai tanggal jatuh tempo mungkin perlu dipertimbangkan. Jika akuntansi penggajian dilakukan oleh kontraktor eksternal, data upah dan gaji harus dikirim ke kontraktor sekitar sepuluh hari sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini berlaku khususnya jika tanggal jatuh tempo jatuh pada hari Senin atau pada hari setelah hari libur nasional.
- 8 Di negara bagian dan wilayah federal di mana tanggal 15.08.2024 merupakan hari libur nasional (Hari Asumsi), pajak jatuh tempo pada tanggal 16.08.2024.